



## **Komunikasi Media Sebagai Kontrol Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah (Analisis Teori Media Baru)**

**Muslimin Ritonga<sup>1</sup>, Hafidz Khoiril Murtadho<sup>2</sup>,  
Dewi Sartina<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia*

*<sup>1</sup>[musliminritonga@radenfatah.ac.id](mailto:musliminritonga@radenfatah.ac.id), <sup>2</sup>[hafidzkhoirilm@radenfatah.ac.id](mailto:hafidzkhoirilm@radenfatah.ac.id),  
<sup>3</sup>[sartinadewi4796@gmail.com](mailto:sartinadewi4796@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana teknologi digital mampu mempengaruhi serta memberikan kontrol kebijakan publik pemerintah kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana informasi yang tersebar diberbagai platform media sosial mampu mencuri atensi publik khususnya di kabupaten Pati dengan menggunakan teori komunikasi media baru. Perkembangan teknologi dewasa ini semakin maju tentunya menambah kekuasaan masyarakat dalam memberikan kritik, memberikan kontrol kebijakan serta mampu mempengaruhi hasil keputusan kebijakan publik pemerintah. Maka penulis tertarik meneliti tentang Komunikasi Media Sebagai Kontrol Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka semakin luas pula ruang publik guna memberikan kritik, saran, pengawasan serta kontrol atas kebijakan publik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Fokus penelitian ini komunikasi media sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten Pati. Bagaimana andil besar media menjadi kontrol kebijakan publik pemerintah khususnya diwilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci :** *Kebijakan Publik, Media Baru, Komunikasi Media*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze how digital technology can influence and provide control over public policy in the Pati Regency Government, Central Java. It explores how information disseminated across various social media platforms can capture public attention, particularly in Pati Regency, using the theory of new media communication. The rapid advancement of technology today has empowered the public to voice criticism, exercise policy oversight, and influence government decision-making in public policy. Therefore, the author is interested in examining Media Communication as a Tool for Public Policy Control in the Pati Regency Government, Central Java. With the development of information and communication technology, the public sphere has expanded, enabling greater opportunities for criticism, suggestions, supervision, and control over public policies. This research employs a qualitative method in the form of library research, utilizing books and other literature sources. The focus of this study is media communication as a means of policy control in the Pati Regency Government. It investigates the significant role of media in overseeing public policy, particularly in the Pati Regency of Central Java.*

**Keywords :** *Public policy, New Media, Media Communication*

## PENDAHULUAN

Kemunculan media baru adalah sebagai bagian dari percepatan akses teknologi informasi yang begitu luas dan cepat. Media baru memungkinkan bagi semua orang untuk berinteraksi dan menghilangkan jarak komunikasi diantara mereka <sup>1</sup>. Karakter media baru yang lebih fleksibel menjadi pilihan bagi semua orang, tidak terkecuali remaja/Anak muda. Perdebatan yang muncul bahwa media baru dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah hanya untuk pemenuhan gaya hidup dan kesenangan (leisure) bukan untuk hal yang bersifat kritis atau meningkatkan wawasan seseorang. Anak remaja/anak muda dipersepsikan menjadi pribadi yang negatif saat datangnya media baru, karena media baru yang dibawa oleh teknologi informasi yang bersifat pervasive membuat media adalah bagian dari mereka, artinya disini

---

<sup>1</sup>Muhammad Amril Pratama Putra and M. Rusdi, "Public Communication Strategy in Increasing Community Involvement in Central Java," *Kybernology: Journal of Government Studies*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i1.12727>.

bahwa kecenderungan anak muda zaman sekarang adalah tergantungnya diri mereka akan media.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh CNN Indonesia pada bulan September 2016 mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh Anak Muda, rentang usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun memiliki angka penetrasi hingga lebih dari 80 persen pengguna internet di Indonesia., kemudian kategori 20-24 tahun ditemukan 22,3 juta jiwa yang setara 82 persen dari total penduduk di kelompok itu. Sedangkan pada kelompok 25-29 tahun, terdapat 24 juta pengguna internet atau setara 80 persen total jumlah jiwa, indikasi dominasi usia muda terlihat dari aktivitas menonton film secara daring, memutar musik online, dan menonton olahraga online menjadi pilihan utama pengguna internet sebagai sumber hiburannya. Data tersebut dapat diketahui bahwa sosial media, internet sebagai media baru di kalangan anak muda menyebutkan bahwa ada pola gaya hidup baru yang terjadi saat ini <sup>2</sup>. Pola perilaku anak muda saat ini menurut data diatas adalah bahwa anak muda era millenials menggunakan daring sebagai aktivitas bermedia mereka sehari-hari (CNN Indonesia, 2016).

Media massa, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan platform online, memiliki peran penting dalam masyarakat modern. Media bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan informasi, pendapat, dan pandangan yang beragam kepada publik. Media sebagai Pengawas dan Pemantau: Media memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau terhadap tindakan pemerintah <sup>3</sup>. Dengan memberikan liputan independen dan investigatif, media dapat mengontrol tindakan pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan. Peran media sebagai kontrol kebijakan sosial pemerintah merujuk pada kemampuan media untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengawasi perilaku serta nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat <sup>4</sup>. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik,

---

<sup>2</sup>Aat Ruchiat Nugraha et al., *Komunikasi Humas Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Melalui Media Digital Instagram*, 8 (2020): 221, <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26407>.

<sup>3</sup>“Public Communication Through Social Media During The Covid-19 Pandemic In Sleman Regency, Yogyakarta,” In *Public Policy And Administration*, preprint, 2023, <https://doi.org/10.13165/vpa-23-22-4-16>.

<sup>4</sup>Udaya Madjid et al., “Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province,” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>.

mempengaruhi persepsi, dan memengaruhi keputusan-keputusan sosial yang diambil oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting dari peran media sebagai kontrol kebijakan sosial adalah fungsi pengawasan atau "*watchdog*". Media berperan sebagai penjaga atau pengawas terhadap kekuasaan dan pemerintahan. Dengan memberikan liputan yang kritis dan objektif terhadap tindakan pemerintah, media dapat mengungkapkan kebijakan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku korup yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, media membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem sosial dan politik. Namun, peran media sebagai kontrol sosial juga dapat menjadi kontroversial. Terkadang, media dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau propaganda yang bertujuan mengendalikan opini public <sup>5</sup>.

Keberadaan media sosial dan penyebaran berita palsu di platform digital semakin memperumit peran media dalam masyarakat modern. Dalam rangka menjaga peran media sebagai kontrol kebijakan yang efektif, penting untuk mendorong media yang independen, beragam, dan bertanggung jawab <sup>6</sup>. Regulasi yang tepat, kebebasan pers, dan literasi media yang tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi positif media sebagai kontrol sosial. Meskipun memiliki peran penting, media juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan peran kontrol sosialnya. Beberapa tantangan termasuk bias politik dalam pemberitaan, kepentingan komersial yang mempengaruhi isi berita, dan kendala regulasi yang dapat membatasi kebebasan pers.

Dalam algoritma media sosial dalam beberapa hari terakhir keputusan bupati Pati Jawa Tengah H. Sudewo, S.T, M.T menjadi kontroversi berita nasional khususnya masyarakat kabupaten Pati. Kebijakan untuk menaikkan PBB sebesar 250% di anggap masyarakat pati sangat memberatkan bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Selain kebijakan menaikkan PBB 250% Bupati Pati juga mengucapkan statement yang kontroversi dengan tidak akan merubah kebijakannya

---

<sup>5</sup>Mugi Lestari and Dhika Surya P, "Analysis of Public Communication Strategy in Teluk Bintuni Regency in the Digital Era," *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v2i4.162>.

<sup>6</sup>N. Ismail et al., "New Media In Local Government Administration – An Approach Based On The Mec Model," *International Journal of Law, Government and Communication*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.729035>.

apapun yang terjadi, bahkan mempersilahkan masyarakat untuk demo bukan hanya 5000 orang, tapi 50.000 orang beliau tidak gentar. Dengan mengeluarkan kebijakan dan statement yang kontroversi bupati Pati bapak H. Sudewo, S.T, M.T menjadi atensi publik khususnya masyarakat Pati Jawa Tengah. Penyebaran informasi dan video statement kontroversi bupati Pati tersebar dengan masif keseluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Pati dan sekitarnya, gelombang protes atas kebijakan dan statement kontroversi bupati Pati semakin tinggi dan meluas. Sehingga pada hari jum'at tanggal 8 Agustus 2025 bupati Pati melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat serta membatalkan kebijakan menaikkan PBB 250%.

Pembatalan kebijakan tersebut tidak membuat gelombang protes mereda, hal tersebut dikarenakan statement kontroversi bupati Pati yang seolah menantang masyarakat untuk unjuk rasa dan memobilisasi massa sebanyak mungkin untuk protes kebijakan kenaikan 250% PBB di Kabupaten Pati. Sehingga memuncaklah unjuk rasa masyarakat Pati pada hari Rabu 13 Agustus 2025 di depan kantor bupati Pati yang diperkirakan di hadiri 100.000 masyarakat Pati yang bukan hanya menuntut pembatalan kenaikan PBB 250% bahkan menuntut bupati Pati Jawa Tengah H. Sudewo, S.T, M.T untuk mundur dari jabatannya. Meneliti mengenai “Komunikasi Media Sebagai Kontrol Kebijakan Publik Pemerintah” menjadi sebuah penelitian yang menarik dan isu aktual yang sedang menjadi atensi publik nasional khususnya di wilayah Pati Jawa Tengah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi media mampu menjadi kontrol kebijakan publik di Kabupaten Pati, hal ini menjadi sebuah fenomena baru bagaimana informasi dapat tersebar dengan cepat dan masif keseluruh lapisan masyarakat khususnya diwilayah Pati, sehingga mampu merubah sebuah kebijakan pemerintah dan dapat memobilisasi massa untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut agar bupati Pati mengundurkan diri dari jabatannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Penelitian kualitatif diperlukan analisis deskriptif guna dan memberikan gambaran keterangan yang jelas, objektif, sistematis, analitis, serta kritis tentang komunikasi media sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten Pati. Data yang dikumpulkan menggunakan tiga metode : Eksploratif, yaitu mengeksplorasi dan memberikan penjabaran data secara faktual.

Interpretasi, yaitu memberikan makna, arti, dan analisis kepada pola dekriptif keterkaitan antara data yang ditemukan (Barnsley & Ellis, 1992). Analisis, yaitu upaya yang dilakukan guna mendapatkan ilmu pengetahuan secara ilmiah dengan perincian terhadap objek yang diteliti, atau hanya untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu hal

Sumber data berasal dari artikel jurnal, buku, konten yang ada di media digital, dan hasil diskusi penelitian terdahulu. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis menggunakan teknik *descriptive analysis content* (analisis deskriptif konten), maksudnya adalah peneliti membahas isi dan informasi secara mendalam. setidaknya ada empat alasan mengapa metode kualitatif digunakan, yaitu: data yang diperoleh sangat mendasar, hasil dan pembahasan penelitian yang mendalam, sifatnya inklusif, dan realistis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dan menggunakan jenis studi analisis media baru yang mampu menjadi kontrol kebijakan publik pemerintah kabupaten Pati. Peneliti mengumpulkan data keseluruhan kemudian membaca dan mempelajarinya. Kemudian dilakukan pencatatan terhadap hal-hal yang penting yang dapat digunakan dalam mempertajam analisis penelitian. Setelah semua data terkumpul, lalu dilakukan kategorisasi dan polarisasi sehingga dapat memudahkan proses interpretasi data terhadap penjelasan mengenai komunikasi media sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten Pati (Analisis Teori Media Baru). Fokus penelitian ini komunikasi media sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten Pati. Bagaimana andil besar media menjadi kontrol kebijakan publik pemerintah khususnya di wilayah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Media Baru**

Kemunculan media baru adalah sebagai bagian dari percepatan akses teknologi informasi yang begitu luas dan cepat. Media baru memungkinkan bagi semua orang untuk berinteraksi dan menghilangkan jarak komunikasi di antara mereka. Karakter media baru yang lebih fleksibel menjadi pilihan bagi semua orang, tidak terkecuali remaja/Anak muda. Perdebatan yang muncul bahwa media baru dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah hanya untuk pemenuhan gaya hidup dan kesenangan (*leisure*) bukan untuk hal yang bersifat kritis atau

meningkatkan wawasan seseorang<sup>7</sup>. Anak remaja/anak muda dipresepikan menjadi pribadi yang negatif saat datangnya media baru, karena media baru yang dibawa oleh teknologi informasi yang bersifat pervasive membuat media adalah bagian dari mereka, artinya disini bahwa kecenderungan anak muda zaman sekarang adalah tergantungnya diri mereka akan media

Lev Manovich didalam buku karyanya berjudul *The New media Reader* ia mengungkapkan bahwa media baru adalah objek budaya dalam sebuah paradigma baru melalui dunia media masa dalam lingkungan masyarakat. New media memungkinkan terjadinya penyebaran informasi yang dilakukan melalui teknologi komputer dan data digital yang dikendalikan oleh aplikasi. Media baru mengalami pembaharuan dalam model penyebaran informasi yang memanfaatkan teknologi jaringan perangkat lunak. Selain itu ada juga ungkapan dari Martin Lister dalam buku karyanya yang berjudul *New media: A Critical Introduction* yang menyatakan bahwa media baru adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu hal tentang perubahan dalam skal besar dalam produksi suatu media, artinya bahwa yang didalamnya ada distribusi media, dan penggunaan media yang bersifat teknologis dan konvensional budaya<sup>8</sup>. Perubahan media yang cenderung pesat mampu mengubah dan memengaruhi masyarakat dalam kehidupan sosial. Generasi Muda merupakan bagian penting dan sasaran utama dari percepatan akses teknologi informasi, media baru atau New Media menjadi bagian penting dalam perubahan teknologi informasi. Generasi muda dewasa ini masuk kedalam pusran masyarakat informasi, mereka menggunakan New media dalam aktivitas masyarakat informasi dan jangkauan akses yang sama dalam teknologi informi.

Dengan kehadiran media baru ketergantungan masyarakat terhadap media lama mulai tergeser digantikan oleh sebuah media yang lebih real time, efektif dan yakni new media. Bentuk lain dari new media yang juga mengambil alih sebagian besar waktu dan kegiatan sehari-hari khalayak luas yang sudah tak lagi asing bagi kita yaitu portal berita daring baik yang bersumber dari media-media kredibel yang akuntabel maupun bersumber dari media-media amatir atau sekedar media yang

---

<sup>7</sup>Michael Rooney Gomar, "Analyzing The Influence of Social Media Posts on Government Policy Adoption in Papua City," *Eduvest - Journal of Universal Studies*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1071>.

<sup>8</sup>M. Muslimin et al., "New Press and Restoration of the Press as a Social Control Media in Indonesia from a Democracy Point of View," *Society*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.668>.

berisi opini seseorang<sup>9</sup>. Besarnya peran media online menggeser media konvensional adalah sebuah bukti implikasi lain bagaimana new media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat hari ini. Adanya situs berita online mempermudah masyarakat dalam mengakses berita secara cepat dan real time dari mana saja. New Media memainkan peran dan memiliki implikasi yang sangat penting di setiap aspek kehidupan masyarakat<sup>10</sup>. Media sangat mempengaruhi kehidupan kita karena media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran kita. Pengaruh ini terkadang positif dan terkadang negatif.

Kehadiran media baru sangat memungkinkan munculnya fenomena baru yaitu, *hipperrealitas*, sejalan dengan yang di kemukakan oleh Jean Baudrillard mengenai “*simulacra and simulation*”, (Baudrillard 1988). bahwa dalam media baru tersebut mampu menciptakan kepalsuan-kepalsuan dan bercampur dengan keaslian, dimana kebenaran saat ini sudah tidak bisa dibedakan lagi karena antara kebenaran dengan kepalsuan tersebut melebur bersama realitas yang ada. Peran media sebagai kontrol kebijakan sosial pemerintah merujuk pada kemampuan media untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengawasi perilaku serta nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat<sup>11</sup>. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi, dan memengaruhi keputusan-keputusan sosial yang diambil oleh masyarakat. Salah satu aspek penting dari peran media sebagai kontrol kebijakan sosial adalah fungsi pengawasan atau “*watchdog*”. Media berperan sebagai penjaga atau pengawas terhadap kekuasaan dan pemerintahan. Dengan memberikan liputan yang kritis dan objektif terhadap tindakan pemerintah, media dapat mengungkapkan kebijakan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku korup yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, media membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem sosial

---

<sup>9</sup>D. Kurnia and Arlan Siddha, “Ridwan Kamil: The Result of Media Power in West Java,” *Journal of Governance*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16885>.

<sup>10</sup>Nur Imroatus Sholikhah et al., “The Meaning of Digital Era Public Communication by Indonesia’s Local Governments Using Luhmann’s System Theory: A Case Study of Central Java Provincial Government 2018-2022,” *International Journal of Communication and Society*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.31763/ijcs.v7i1.1269>.

<sup>11</sup>Eni Maryani et al., “Digital Media and Public Access to Educational and Political Information in Pangandaran in the Digital Age,” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i2.748>.

dan politik.

Namun, peran media sebagai kontrol sosial juga dapat menjadi kontroversial. Terkadang, media dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau propaganda yang bertujuan mengendalikan opini publik. Keberadaan media sosial dan penyebaran berita palsu di platform digital semakin memperumit peran media dalam masyarakat modern. Dalam rangka menjaga peran media sebagai kontrol kebijakan yang efektif, penting untuk mendorong media yang independen, beragam, dan bertanggung jawab. Regulasi yang tepat, kebebasan pers, dan literasi media yang tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi positif media sebagai kontrol sosial<sup>12</sup>. Meskipun memiliki peran penting, media juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan peran kontrol sosialnya. Beberapa tantangan termasuk bias politik dalam pemberitaan, kepentingan komersial yang mempengaruhi isi berita, dan kendala regulasi yang dapat membatasi kebebasan pers.

### **Sekilas Tentang Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kota Pati, Juwana, dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk rencana pola ruang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Pati merupakan salah satu kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo. Untuk kawasan budidaya, wilayah Kabupaten Pati diarahkan untuk pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara geografis Kabupaten Pati terletak diantara 1100, 50' - 1110, 15' bujur timur dan 60, 25' – 70,00' lintang selatan. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan terletak pada bagian timur Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten, yaitu Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Rembang, dan Kab. Grobogan.

---

<sup>12</sup>Nila Nurlimah and Yenni Yuniati, "Political PR Management in Government Press Conference," *Proceedings of the Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020)*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210617.011>.



Partisipasi ini dapat terwujud dalam bentuk diskusi online, advokasi, atau bahkan protes terhadap kebijakan atau tindakan pejabat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat sipil, dengan keahlian dan jaringan yang dimilikinya, memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama, termasuk isu kontroversial. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat edukasi publik yang efektif karena jangkauannya yang luas dan kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara instan. Media sosial juga telah menjadi alat kontrol sosial yang penting, di mana masyarakat memungkinkan untuk secara langsung mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah<sup>14</sup>. Media sosial disini berfungsi sebagai forum terbuka di mana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk dalam mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas<sup>15</sup>. Media sosial memungkinkan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang mungkin tidak mendapat sorotan media mainstream<sup>16</sup>. Misalnya, kebijakan kontroversial yang merugikan masyarakat umum dan statemen yang cenderung arogan sehingga menimbulkan polemik di lingkungan. Penyebaran informasi yang cepat dan masif keseluruh lapisan masyarakat ini juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengikuti kasus ini.

Dalam rangka menjaga peran media sebagai kontrol kebijakan publik pemerintah yang efektif, penting untuk mendorong media yang independen, beragam, dan bertanggung jawab. Regulasi yang tepat, kebebasan pers, dan literasi media yang tinggi menjadi kunci dalam mengoptimalkan kontribusi positif media sebagai kontrol kebijakan

---

Social Media in Indonesia,” *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3902-12>.

<sup>14</sup>Iqbal Maulana Firdaus and A. Mahendra, “Implementation of the Public Relations Function at the Secretariat of the Pati Regency House of Representatives,” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1603>.

<sup>15</sup>Jiehua Zhong and Chuanjie Lin, “Local Government Online Public Opinion Governance in the New Media Era Based on the Perspective of Public Crisis Management,” *Media and Communication Research*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.23977/mediacr.2023.040806>.

<sup>16</sup>Intje Yusuf et al., “The Role of Government Public Relations in Digital Media in Building a Positive Image of the Central Sulawesi Provincial Government,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5584>.

publik. Dengan memberikan liputan yang kritis dan objektif terhadap tindakan pemerintah, media dapat mengungkapkan kebijakan serta aturan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, media membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem sosial dan politik<sup>17</sup>. Kehadiran media baru sangat memungkinkan munculnya fenomena baru yaitu, hipperrealitas, sejalan dengan yang di kemukakan oleh Jean Baudrillard mengenai “simulacra and simulation”, (Baudrillard 1988). bahwa dalam media baru tersebut mampu menciptakan kepalsuan-kepalsuan dan bercampur dengan keaslian, dimana kebenaran saat ini sudah tidak bisa dibedakan lagi karena antara kebenaran dengan kepalsuan tersebut melebur bersama realitas yang ada.

Peran media sebagai kontrol kebijakan sosial pemerintah merujuk pada kemampuan media untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengawasi perilaku serta nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat<sup>18</sup>. Dalam hal ini, media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, mempengaruhi persepsi, dan memengaruhi keputusan-keputusan sosial yang diambil oleh masyarakat. Selain itu Media sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda publik dan kebijakan pemerintah<sup>19</sup>. Kebijakan dan aturan pemerintah yang menyimpang atau cenderung merugikan masyarakat akan menjadi polemik bola panas, perbincangan dan pembahasan terkait kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat bukan hanya terjadi pada lingkungan sosial, melainkan juga bisa meluas ke media sosial yang tidak memiliki batas wilayah dalam akses informasi<sup>20</sup>. Jika sebuah informasi terkait kebijakan publik yang kontroversi dan cenderung merugikan

---

<sup>17</sup>I. Putu et al., “Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bangli,” *Anubhava: Jurnal Ilmu Komunikasi HIIndu*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.25078/anubhava.v5i2.4944>.

<sup>18</sup>Desak Tri Mahadewi and G. Darma, “Government Public Communication Strategy Through Social Media In the Digital Era (Case Study on Bangli Regency Government),” *Eduvest - Journal of Universal Studies*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1334>.

<sup>19</sup>Mahadewi and Darma, “Government Public Communication Strategy Through Social Media In the Digital Era (Case Study on Bangli Regency Government).”

<sup>20</sup>Sukarniaty Kondolele et al., “The Nexus between Public Communication and Policy Implementation Revisited: Insights from the Population and Civil Registration Service of South Sulawesi, Indonesia,” *Frontiers in Communication*, ahead of print, 2025, <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1556747>.

masyarakat telat masuk ke ranah media sosial akan menarik minat dan menjadi atensi publik.

Algoritma media sosial dalam beberapa hari terakhir menunjukkan informasi tentang keputusan bupati Pati Jawa Tengah H. Sudewo, S.T, M.T menjadi kontroversi berita nasional khususnya masyarakat kabupaten Pati. Kebijakan untuk menaikkan PBB sebesar 250% di anggap masyarakat pati sangat memberatkan bagi masyarakat apalagi bagi masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. Kebijakan menaikkan pajak PBB dianggap masyarakat sangat mendadak dan tanpa mempertimbangkan opini masyarakat. Selain kebijakan menaikkan PBB 250% Bupati Pati juga mengucapkan statement yang kontroversi dengan tidak akan merubah kebijakannya apapun yang terjadi, bahkan cenderung menantang masyarakat yang menentang kebijakannya dengan mempersilahkan masyarakat untuk demo bukan hanya 5000 orang, tapi 50.000 orang beliau tidak gentar.

Ucapan kontroversial dari bupati Pati menyulut amarah masyarakat yang menganggap bupati Pati Otoriter dengan kebijakannya dan arogan sebab menantang masyarakat secara terbuka didepan media. Dengan mengeluarkan kebijakan dan statement yang kontroversi bupati Pati bapak H. Sudewo, S.T, M.T menjadi atensi publik khususnya masyarakat Pati Jawa Tengah. Penyebaran informasi dan video statement kontroversi bupati Pati tersebar dengan masif keseluruhan lapisan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Pati dan sekitarnya, gelombang protes atas kebijakan dan statement kontroversi bupati Pati semakin tinggi dan meluas. Sehingga pada hari jum'at tanggal 8 Agustus 2025 bupati Pati melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat serta membatalkan kebijakan menaikkan PBB 250%. Namun pembatalan kebijakan tersebut tidak membuat gelombang protes mereda, hal tersebut dikarenakan statement kontroversi bupati Pati yang seolah menantang masyarakat untuk unjuk rasa dan memobilisasi massa sebanyak mungkin untuk protes kebijakan kenaikan 250% PBB di Kabupaten Pati.

Ketegangan antara masyarakat dan pemerintah kabupaten Pati bermula pada hari Rabu Tanggal 6 Agustus 2025 yang melibatkan PLT SEKDA Pati bapak Riyoso yang bersitegang dengan para pendemo, Riyoso bersama Satpol PP berusaha menertibkan dan menyita donasi masyarakat dalam rencana aksi demo 13 Agustus 2025. Sehingga memuncaklah unjuk rasa masyarakat Pati pada hari Rabu 13 Agustus 2025 di depan kantor bupati Pati yang diperkirakan di hadiri 100.000 masyarakat Pati yang bukan hanya menuntut pembatalan kenaikan PBB

250% bahkan menuntut bupati Pati Jawa Tengah H. Sudewo, S.T, M.T untuk mundur dari jabatannya. Gelombang aksi demo menginginkan segera bupati Pati di turunkan sebagai bupati Pati dengan mendesak DPRD Kabupaten Pati segera membentuk Panitia khusus (PANSUS) hak angket pemakzulan bupati Sudewo. Menanggapi polemik dimasyarakat DPRD Kabupaten Pati melakukan sidang paripurna mendadak pada tanggal 13 Agustus 2025 yang dihadiri anggota dewan dan perwakilan pengunjung rasa guna mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat. Akhirnya setelah menimbang dan mendengar pendapat anggota DPRD dan masyarakat Pati, ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin memutuskan menyetujui hak angket pemakzulan bupati Pati dengan segera membentuk pansus Pemakzulan bupati.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa media sosial yang menjadi awal untuk memengaruhi agenda publik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan keputusan publik yang memiliki atensi besar cenderung menjadi senjata menekan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ungkapan “No Viral No Justice” sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan peran media sosial sebagai kontrol kebijakan publik pemerintah, hal ini disebabkan ruang diskusi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah mulai bergeser ke media sosial <sup>21</sup>. Semakin besar atensi publik maka akan semakin besar tekanan terhadap kebijakan publik pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, hal ini tentunya berdampak positif disebabkan masyarakat secara pribadi dapat memberikan masukan serta kritik terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga kebebasan mengemukakan pendapat lebih bisa terjamin dan di dengar oleh pemerintah

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan media baru menjadi menjadi wadah tersendiri bagi masyarakat umum untuk dapat mengetahui sekaligus memberikan kontrol penuh terhadap kebijakan publik pemerintah. Media sosial memiliki kekuatan untuk memengaruhi agenda publik dan kebijakan pemerintah, ungkapan “No Viral No Justice” adalah gambaran peran media yang begitu besar untuk mempengaruhi kebijakan publik

---

<sup>21</sup>Jumroh Jumroh et al., “Exploring the Impact of Social Media Technology on Public Service Efficiency: A Case Study of Indonesian Local Government,” *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5181>.

pemerintah yang merugikan masyarakat seperti halnya yang terjadi pada masyarakat kabupaten Pati. Atensi yang tinggi dari masyarakat Pati terhadap kebijakan menaikkan pajak PBB 250% menjadi viral di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah. Selain itu video statement kontroversial bupati Pati yang tersebar luas diseluruh platform media sosial yang menunjukkan seberapa arogannya sosok bupati Pati yang tidak akan merubah keputusannya apapun yang terjadi dan cenderung menantang masyarakat yang menentang keputusannya untuk mengumpulkan masa yang banyak semakin menambah luka bagi masyarakat kabupaten Pati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atnan, Nur, and Anam Abrar. "Relation of Social Media Literacy, Trust, and Information Quality on Public Communication Behaviour in Urban Local Government Social Media in Indonesia." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2023-3902-12>.
- Firdaus, Iqbal Maulana, and A. Mahendra. "Implementation of the Public Relations Function at the Secretariat of the Pati Regency House of Representatives." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1603>.
- Gomar, Michael Rooney. "Analyzing The Influence of Social Media Posts on Government Policy Adoption in Papua City." *Eduvest - Journal of Universal Studies*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1071>.
- Ismail, N., Mohd Hilmi Hamzah, Fauziah Ismail, and Siti Norayu Mohd Basir. "New Media In Local Government Administration – An Approach Based On The Mec Model." *International Journal of Law, Government and Communication*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.35631/ijlgc.729035>.
- Jumroh, Jumroh, Darius Antoni, Ahmad Mustain, and Muhammad Yoga Jusri Pratama. "Exploring the Impact of Social Media Technology on Public Service Efficiency: A Case Study of Indonesian Local Government." *Journal of Infrastructure, Policy*

- and Development*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.5181>.
- Kondolele, Sukarniaty, M. Sultan, M. Akbar, and Bama Andika Putra. “The Nexus between Public Communication and Policy Implementation Revisited: Insights from the Population and Civil Registration Service of South Sulawesi, Indonesia.” *Frontiers in Communication*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1556747>.
- Kurnia, D., and Arlan Siddha. “Ridwan Kamil: The Result of Media Power in West Java.” *Journal of Governance*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16885>.
- Lestari, Mugi, and Dhika Surya P. “Analysis of Public Communication Strategy in Teluk Bintuni Regency in the Digital Era.” *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.46336/ijlcb.v2i4.162>.
- Madjid, Udaya, M. Kawuryan, Ahmad Averus, and T. Triyanto. “Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province.” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>.
- Mahadewi, Desak Tri, and G. Darma. “Government Public Communication Strategy Through Social Media In the Digital Era (Case Study on Bangli Regency Government).” *Eduvest - Journal of Universal Studies*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1334>.
- Maryani, Eni, S. Priyadharma, and Ilham Gemiharto. “Digital Media and Public Access to Educational and Political Information in Pangandaran in the Digital Age.” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, ahead of print, 2022. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v7i2.748>.
- Muslimin, M., Febrian Febrian, and Mada Apriandi. “New Press and Restoration of the Press as a Social Control Media in Indonesia from a Democracy Point of View.” *Society*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.668>.

- Nugraha, Aat Ruchiat, Diah Fatmaa Sjoraida, Lukiati Komala Erdinaya, and K. Komariah. *Komunikasi Humas Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Melalui Media Digital Instagram*. 8 (2020): 221. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.26407>.
- Nurlimah, Nila, and Yenni Yuniati. "Political PR Management in Government Press Conference." *Proceedings of the Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020)*, ahead of print, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210617.011>.
- "Public Communication Through Social Media During The Covid-19 Pandemic In Sleman Regency, Yogyakarta." In *Public Policy And Administration*. Preprint, 2023. <https://doi.org/10.13165/vpa-23-22-4-16>.
- Putra, Muhammad Amril Pratama, and M. Rusdi. "Public Communication Strategy in Increasing Community Involvement in Central Java." *Kybernology : Journal of Government Studies*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v3i1.12727>.
- Putu, I., Yoga Andreyana, Dewa Ayu, Hendrawathy Putri, and Gede Suwantana. "Strategi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bangli." *Anubhava: Jurnal Ilmu Komunikasi HIIndu*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.25078/anubhava.v5i2.4944>.
- Sholikhah, Nur Imroatus, H. Wahyuni, and Rahayu Rahayu. "The Meaning of Digital Era Public Communication by Indonesia's Local Governments Using Luhmann's System Theory: A Case Study of Central Java Provincial Government 2018-2022." *International Journal of Communication and Society*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v7i1.1269>.
- Yusuf, Intje, Muhammad Khairil, and Sitti Murni Kaddi. "The Role of Government Public Relations in Digital Media in Building a Positive Image of the Central Sulawesi Provincial Government." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, 2025. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i1.5584>.
- Zhong, Jiehua, and Chuanjie Lin. "Local Government Online Public Opinion Governance in the New Media Era Based on the

Perspective of Public Crisis Management.” *Media and Communication Research*, ahead of print, 2023.  
<https://doi.org/10.23977/mediacr.2023.040806>.